

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang secara sadar dan terus menerus dilakukan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dan berkesinambungan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan tersebut. Menurut (Siti Aminah, 2016) dalam penelitiannya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu daerah antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi sektoral, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada dan pada akhirnya dapat mencapai kemakmuran suatu bangsa dan daerah. Demikian halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (Abigael et al., 2016) yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan atau kemajuan dengan melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya factor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan penggunaan teknologi. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur seberapa besar output yang dihasilkan dalam

suatu perekonomian, namun memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintah daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya peran lapangan usaha dalam ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2011-2020

| Tahun | PDRB (Rp) | PDRB (%) |
|-------|-----------|----------|
| 2011 | 5.528.31 | 7,89 |
| 2012 | 5.915.10 | 7,00 |
| 2013 | 6.372,70 | 7,74 |
| 2014 | 6.934.02 | 8,81 |
| 2015 | 7.437,42 | 7,26 |
| 2016 | 8.023.37 | 7,88 |
| 2017 | 8.567.87 | 6,79 |
| 2018 | 9.155.58 | 6,86 |
| 2019 | 9.728.97 | 6,26 |
| 2020 | 9.855.91 | 1,30 |

Sumber: BPS Kabupaten Luwu 2020

Dapat di simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan PDRB harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di setiap lapangan usaha yang telah terbebas dari

pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan, dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,26 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha yang tidak dipengaruhi inflasi. (Badan Pusat Statistik, 2019).

Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu diantaranya adalah pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irawati Bawinti (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah, maka akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pambudy & Syairozi (2019), Danawati et al., (2016). Demikian halnya investasi swasta, Menurut Kurniawan et al., (2017) menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap kenaikan investasi akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2016), Mokodompis et al., (2013) dan Maharani & Isnowati (2014).

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrument penting dalam kebijakan fiskal yang diharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto

(PDB). Secara rill pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal pembangunan peran pemerintah dapat dikaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara terbagi atas dua, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Besarnya pengeluaran dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi dana dari pemerintah pusat yang besar kecilnya sangat bervariasi. Dalam hal ini pemerintah wajib ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum. Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi.

Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Perkembangan pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Menurut Jenis Belanja
Tahun 2011-2020

| Tahun | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | Total |
|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2011 | 363.551.05 | 306.197.36 | 669.748.41 |
| 2012 | 395.692.82 | 261.467.48 | 657.160.30 |
| 2013 | 449.107.98 | 338.465.92 | 787.573.90 |
| 2014 | 492.272.86 | 425.085.97 | 917.358.83 |
| 2015 | 602.813.08 | 542.412.95 | 1.145.226,03 |
| 2016 | 778.188.63 | 744.698.04 | 1.522.886.67 |

| | | | |
|------|------------|------------|--------------|
| 2017 | 729.850.32 | 593.774.92 | 1.323.625.24 |
| 2018 | 788.653.67 | 542.914.94 | 1.331.568.61 |
| 2019 | 819.688.00 | 657.299.99 | 1.476.987.99 |
| 2020 | 789.208.90 | 593.686.80 | 1.382.895.70 |

Sumber: BPS Kabupaten Luwu 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realiasi belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun. Berdasarkan persentase pengeluaran dapat dilihat bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD.

Variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal swasta yang secara akumulatif memiliki nilai investasi dan output/produksi yang lebih besar dan selanjutnya dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Tumbuhnya perekonomian daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Investasi Swasta diperlukan karena dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan biaya yang cukup besar yang salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di suatu negara/wilayah. Investasi di sektor barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja (Buana et al., 2015).

Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) antara tahun 2015 hingga tahun 2018 di Kabupaten Luwu mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2015, realisasi investasi mencapai Rp567,97 milyar, tetapi pada tahun 2018 hanya Rp16,69 milyar (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini menjadi tantangan bagi

pemerintah Kabupaten Luwu untuk mengoptimalkan peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh terkait kondisi perekonomian Kabupaten Luwu dengan jumlah penduduk sebesar 362.027 jiwa selama tahun 2019 atau sekitar 4,09 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,26 persen. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 46,18 ribu jiwa atau 12,76% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Luwu, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu, oleh sebab itu pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat memacu peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan perbedaan hasil antar penelitian yang dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Maharani dan Sri Isnawati (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya otonomi daerah pengeluaran pemerintah dan investasi swasta memiliki peran besar dalam perkembangan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buana., et al (2018), Haryanto (2013), dan Heri Suparno (2014). Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh P. Alan Jirang et,al (2015), Kurniawan., et al (2017), dan Hukubun., et al (2014)

yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi artinya peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta tidak dapat menaikkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dampak nyata bagi kenaikan taraf hidup suatu daerah. Sehingga dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu?
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu?
3. Apakah pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan.
- b. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga peneliti menjadi tahu pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.
- b. Bagi Pengambil Kebijakan, sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dalam kebijakan terkait besarnya pengeluaran pemerintah yang sudah dilakukan serta peningkatan investasi swasta guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu, sekaligus menyediakan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan baru di periode selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari uraian tentang pengeluaran pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari uraian tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Keynesian (Harrod-Domar)

Keynes berpendapat bahwa sistem *Leissez Faire* murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi “Full Employment”. Situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat (output yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi “kekurangan produksi”. Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat dengan demikian, dapat mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi *Full Employment*. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun, yang terdiri dari 3 unsur:

1. Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (C)
2. Pengeluaran Investasi oleh Perusahaan (I)
3. Pengeluaran Pemerintah (G), pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah

dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan investasi. Yang di formulasikan dalam persamaan:

$$Z = C + I + G \dots \dots \dots (1)$$

Masing-masing unsur penerimaan agregat dipengaruhi oleh beberapa factor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya (*propensity to consume*). Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan (*marginal efficiency of capital*) dan biaya dan (tingkat bunga). Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh politik yang kompleks yang dalam teori makro disebut eksogen.

Teori ini kemudian dikembangkan oleh Harrod-Domar sebagai pelengkap dari analisis yang dilakukan oleh Keynes. Dalam analisis yang dilakukan oleh Keynes menyangkut persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod-Domar merupakan analisis ekonomi jangka panjang yang menyatakan bahwa:

1. Dalam jangka panjang penambahan pengeluaran agregat yang berekepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
2. Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X - M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi.

Dalam menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady state* dalam

jangka panjang. Analisis Harrod dan Domar menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*)
2. Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan
3. Rasio antara modal dan produksi (*capital output ratio*) adalah tetap
4. Perekonomian terdiri dari 2 sektor

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi, jika disuatu perekonomian peran sektor swasta menurun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, maka pemerintah dapat memacu pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat merangsang perkembangan dari sektor-sektor lain.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bentuk utama dari kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan. Penambahan

pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) meminjam dari masyarakat melalui pasar modal (loanable fund); dan 2) meminjam dari bank sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) menurunkan sejumlah pajak tertentu; dan 2) menurunkan persentase pajak pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota).

Hukum Wagner yang dikemukakan oleh N. Gregory (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti teori ini adalah semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan teori Wegner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan, meningkatnya fungsi kesejahteraan, perbankan dan pembangunan (Nahumuri, 2019)

Menurut Mangkoesubroto (1998;169) dalam (Haryanto, 2013) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2.1.2.1 Faktor-Faktor yang Menentukan Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tergantung kepada banyak factor yang penting diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, pertimbangan politik dan keamanan. Salah satu factor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula belanja pemerintah yang akan dilakukan.

2.1.2.2 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemeratan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Abigael et al., 2016).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Bawinti et al., 2018).

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas:

1. **Belanja tak langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan tak terduga.
2. **Belanja langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan

kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.1.3 Investasi Swasta

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta (Raharjo, 2006).

Menurut Afdal (2019), Investasi merupakan penanaman modal atau capital yang bertujuan untuk menambah barang-barang atau alat produksi dalam jangka panjang, dengan pertimbangan dialokasikan pada sector-sector yang menguntungkan dan keamanan dari resiko kerugian. Masalah investasi adalah suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan akan pendapatan yang akan diperoleh dari barang modal di masa yang akan datang. Penghargaan akan pendapatan merupakan factor yang sangat penting untuk menentukan besarnya investasi.

Investasi mempunyai peran penting dalam mempengaruhi permintaan agregat, siklus bisnis (*business cycle*) serta pembentukan modal (*capital accumulation*). Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan

memperoleh pendapatan serta didorong oleh motif pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi akan bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Menurut teori klasik investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat sehingga menyebabkan PDRB meningkat. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan output. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan PDRB.

2.1.3.1 Faktor Faktor Penentu Tingkat Investasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi antara lain :

1. Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*)
kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah factor yang berada dibawah control perusahaan, sedangkan kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic dan internasional.

2. Biaya investasi yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat investasi semakin menurun.
3. *Marginal efficiency of capital* (MEC), tingkat bunga dan *marginal efficiency investment* (MEI) sebagai sebuah keputusan yang rasional.

Berdasarkan jenis investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sector swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta bertujuan untuk mencari keuntungan serta mendorong peningkatan pendapatan. Indikator dalam pengukuran investasi swasta diantaranya :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terbagi atas penanaman modal negeri swasta dan penanaman modal negeri pemerintah. Yang dimaksud dengan penanaman modal negeri swasta adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha swasta domestic. Penanaman modal negeri pemerintah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan atau BUMN atau penyertaan modal pemerintah terhadap perusahaan swasta atas nama lembaga pemerintah.
2. Penanaman Modal Asing (PMA), terdiri atas penanaman modal asing swasta, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta (bukan pemerintah) di negara selain negara asal pemilik modal serta penanaman

modal asing pemerintah/nasional, yaitu penanam modal dari suatu negara ke negara lain atas pemerintah negara pemilik modal.

2.1.3.2 Hubungan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Terdapat kaitan yang sangat erat antara investasi dengan Pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan hubungan positif apabila PDRB naik maka pengeluaran investasi juga akan naik, begitu pula sebaliknya meningkatnya pendapatan suatu daerah mempunyai tendensi meningkatnya permintaan akan barang dan jasa konsumsi, yang berarti akan memerlukan produksi barang dan jasa yang lebih banyak. Hal ini berarti perlu adanya penambahan modal melalui proyek investasi.

Dengan demikian meningkatnya pendapatan mengakibatkan jumlah proyek investasi yang dilakukan oleh masyarakat meningkat, apabila suatu daerah memiliki PDRB yang tinggi maka para investor akan lebih memilih berinvestasi di daerah tersebut, sebaliknya semakin banyak investasi yang dilakukan maka jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah akan semakin meningkat sehingga meningkatkan PDRB.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang

dihitung berdasarkan harga konstan. Jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Menurut Faried W (1992), menerangkan dua konsep pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap (konstan) atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.
2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil > dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup aktual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat dari pada laju pertumbuhan output total riil.

Pertumbuhan ekonomi dalam system pemerintah daerah di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui PDRB. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rill) yang digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Menurut Scumpeter pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya factor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan penggunaan teknologi. Indicator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur seberapa besar output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, namun memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

2.1.4.1 Faktor Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda tergantung pada sumber daya alam, sumber daya modal, teknologi dan lainnya. Beberapa factor pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Sumber daya alam, merupakan factor utama yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah menjadi hal penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai agar pemanfaatan sumber daya alam dapat secara optimal.
2. Akumulasi modal, termasuk investasi yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumber daya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan yang ditabung atau diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.
3. Pertumbuhan penduduk, dan hal yang berhubungan dengan kenaikan angkatan kerja dianggap sebagai factor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan itu tergantung pada system perekonomian yang berlaku dalam menyerap jumlah tenaga kerja secara produktif.
4. Kemajuan teknologi, perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Kemajuan teknologi akan menaikkan produktivitas buruh, modal, dan factor produksi lainnya.

2.1.4.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian perlu ada strategi pembangunan yang tepat. Oleh karena itu indicator yang digunakan untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat Pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan perkapita masyarakat dalam perekonomian.

Produk domestik regional bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dikurangi dengan biaya antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penyajian PDRB terdapat dua cara yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) artinya semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap. Sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan (pengeluaran) yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Kegunaan PDRB yaitu dengan melihat PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya yang besar. Dapat pula menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun dengan melihat PDRB harga konstan (riil). Untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor kategori ekonomi suatu wilayah dengan melihat distribusi PDRB (Sitindaon, 2013).

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta dijelaskan oleh teori Keynes yang menyatakan bahwa untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Yang kemudian teori tersebut dijelaskan kembali oleh Harrod Domar yang menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (*steady growth*). Menurut Harrod Domar investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang disebabkan karena :

1. Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran.
2. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat dengan demikian, dapat mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi *Full Employment*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Variable | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Afdal (2019) Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Modal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo | Investas Swasta (X1), Belanja Modal Daerah (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) | Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga belanja modal daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| 2 | Irawati Bawinti, George M.V. Kawung, Antonius Y. Luntung (2018) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud | Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Swasta (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) | Menggunakan metode analisis regresi linear berganda | Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Investasi Swasta tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. |
| 3 | Sri Danawanti, I K.G. Bendesa, Made Suyana Utama (2016) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja, Perumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali | Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Swasta (X2), Kesempatan Kerja (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4) dan Ketimpangan Pendapatan (Y) | | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 4 | Mefi Hukubun, Debby Rotinsulu, Audie Niode (2014) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2002-2012 | Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Swasta (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) | Menggunakan metode analisis jalur (<i>path analysis</i>) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh investasi pemerintah ke tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi bersifat positif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berfungsi sebagai variabel intervening antara investasi pemerintah terhadap tenaga kerja, investasi swasta ke tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi bersifat negatif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat berfungsi sebagai variabel intervening antara investasi swasta terhadap tenaga kerja di Sulawesi Utara. |
| 5 | P. Alan Jirang, Dr. H. Adnan Haris Musa, MS dan Dr. H. Hadi Wijaya, S.E., M.Si (2015) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur | Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Swasta (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Y1) serta Pengangguran (Y2) | Menggunakan analisis regresi berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, namun secara langsung peningkatan pengeluaran pemerintah mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Selanjutnya, investasi swasta secara langsung belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, namun secara langsung peningkatan investasi swasta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Kemudian, pengeluaran pemerintah tidak berhasil mempengaruhi tingkat pengangguran di Kalimantan Timur secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berhasil menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 6 | Aria Langlang Buana, Herlina Juni Risma Saragih dan Sovian Aritonang (2018) Pengaruh Peeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015 | Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Pemerintah (X2), Investasi Swasta (X3), Tenaga Kerja (Y1) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y2) | Menggunakan analisis regresi berganda. | Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 97% dan sisanya sebesar 3% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
| 7 | Tommy Priyo Haryanto (2013) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011 | Pengeluaran Pemerintah (X) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) | | Hasil dari penelitian ini adalah koefisien positif dari belanja tidak langsung adalah 0.291399 yang berarti jika belanja tidak langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik 0.291399%. Koefisien positif dari belanja langsung sebesar 0.117470 yang berarti jika belanja langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,117470%. Belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| 8 | Heri Suparno (2014) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur | Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X3), Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dan Indeks Pembangunan Manusia (Y2) | Menggunakan metode analisis jalur (<i>path analysis</i>) | Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh tidak langsung antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. |
| 9 | Agus Indriatno Kurniawan, Theresia Militina, dan Rahmad Budi Suharto (2017) Pengaruh Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap | Investasi Swasta (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1) | Menggunakan metode analisis jalur (<i>path analysis</i>) | Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh langsung investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pengaruh tidak langsung investasi swasta, |

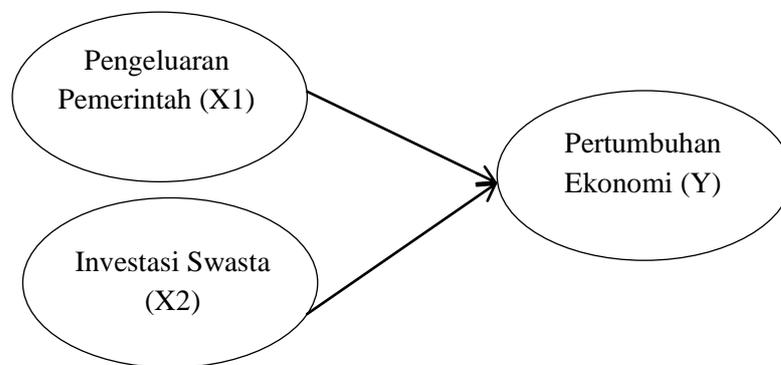
| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | | | pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. |
| 10 | Sitti Aminah (2016) Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi | Investasi Swasta (X1), Pengeluaran Pemerintah Daerah (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan Kemiskinan (Y1) | Menggunakan analisis regresi dengan metode “ <i>Ordinary Least Square</i> ” (OLS). | penelitian ini menunjukkan bahwa investasi swasta dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. |

Sumber: Jurnal Ilmiah dan Skripsi

2.3 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah tertentu dengan melihat nilai PDRB suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan output produksi yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita. Beberapa factor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Dimana pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengeluaran terhadap PDRB yang secara riil jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan PDRB. Demikian halnya dengan investasi swasta yang merupakan pengeluaran dari pihak swasta nasional maupun asing dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan output yang memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB suatu daerah.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, penyusun berusaha untuk menggambarkan tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Setelah membahas maka penyusun membuat kerangka konseptual dalam bentuk diagram beriku ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di duga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.
2. Di duga bahwa investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu
3. Di duga bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.

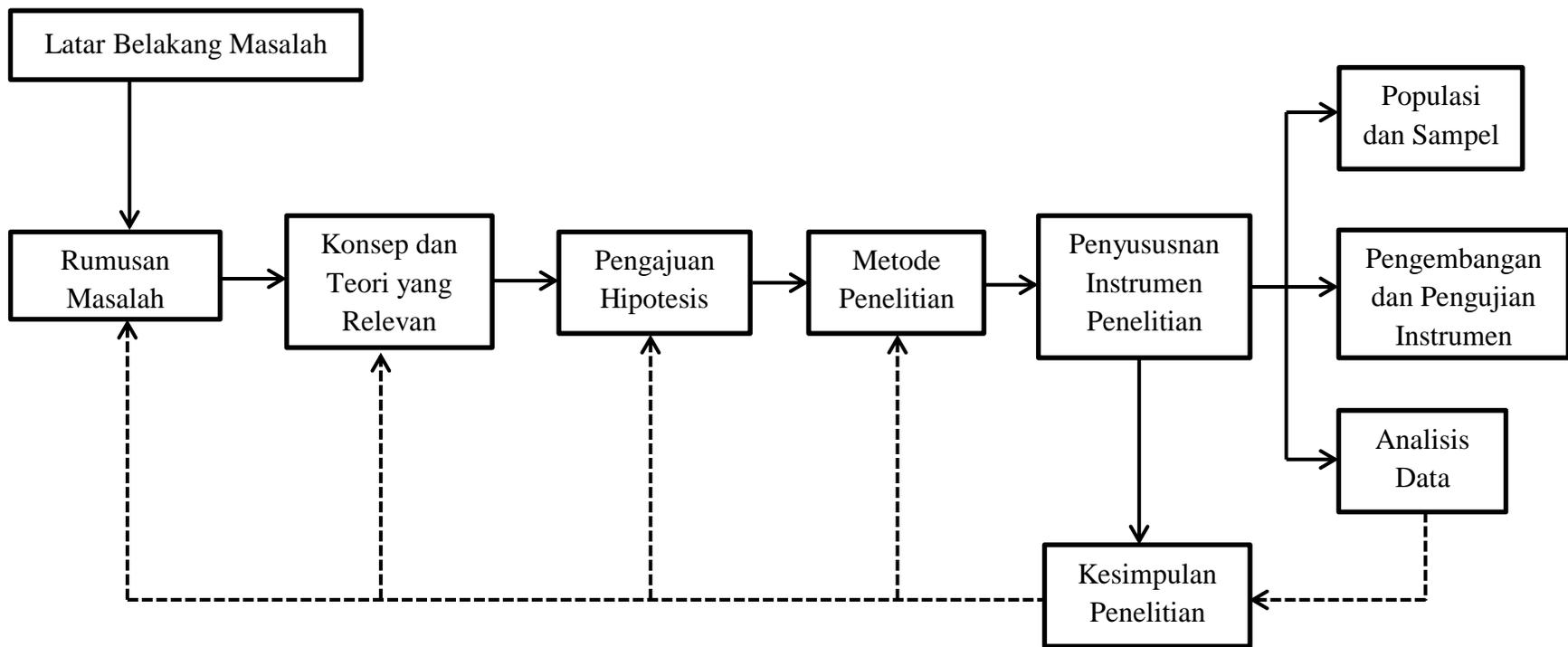
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain artinya rencana atau usaha untuk merencanakan kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dalam unsur masing-masing.

Menurut Ahmad Ghozali (2011) desain penelitian merupakan sebuah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kegiatan pengumpulan dan analisis data tersebut untuk menggali penyelesaian sebuah permasalahan yang muncul. Rencana perlu dibuat agar pengumpulan data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga penelitian tersebut juga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi peneliti. Berdasarkan pemaparan tersebut agar lebih mudah untuk memahami terkait desain penelitian, maka berikut rancangan desain penelitian yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk diagram berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan pertimbangan bahwa data informasi yang dibutuhkan penulis mudah diperoleh serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah 2 (dua) bulan sejak surat izin penelitian diterbitkan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut S. Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah BPS Kabupaten Luwu yang memiliki data pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta selama sepuluh tahun berturut-turut, yakni mulai dari tahun 2011-2020.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel harus memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh populasinya. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data BPS Kabupaten Luwu yang memenuhi kriteria. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang *representative* terhadap populasi, yang meliputi

data tentang pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Luwu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data tahunan (*time series*) yang mencakup tentang tingkat pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu. Sumber data penelitian ini, yaitu data berupa dokumen yang merupakan data tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang telah diarsipkan di BPS Kabupaten Luwu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap BPS Kabupaten Luwu (objek) yang diteliti.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variable yang diteliti terbagi menjadi dua kelompok yaitu variable independen dan variable dependen. Dua variabel independen yakni Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta, sedangkan satu variabel dependen yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

| Variabel Penelitian | Definisi Variabel | Indikator | Satuan | Skala Pengukuran |
|-----------------------------|--|--|---------------|-------------------------|
| Pengeluaran Pemerintah (X1) | Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Langsung • Belanja Tidak Langsung | Rupiah | Skala Rasio |
| Investasi Swasta (X2) | Investasi merupakan kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. | <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Asing (PMA) • Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | Rupiah | Skala Rasio |
| Pertumbuhan Ekonomi (Y) | Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh peningkatan output produksi masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> • PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha | Rupiah | Skala Rasio |

3.7 Instrument Penelitian

Instrument penelitian sebenarnya didesain untuk sebuah tujuan dan tidak digunakan di penelitian yang lain, untuk metode kuantitatif sendiri, pada umumnya instrument yang digunakan berasal dari pengembangan atas penjabaran

variabel penelitian dan teori-teori yang akan diuji pada penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun beberapa rumus persamaan yang dijelaskan pada Bab 2 tinjauan pustaka merupakan sebuah pelengkap dari penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini guna membantu peneliti dalam memahami setiap teori yang digunakan, sedangkan untuk pengujiannya peneliti menggunakan beberapa analisis untuk mengolah data dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Instrument penelitian merupakan alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk keperluan penelitian (Ahmadin 2013:102). Instrument sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data dan merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket/kuesioner, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, siaka dan lain-lain.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, tidak mengandung heteroskedastisitas dan linieritas (Suliyanto, 2011). Uji asumsi klasik meliputi:

3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.

Nilai residual yang terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebur sampai tidak terhingga. Untuk mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak maa digunakan metode uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Text*.

3.8.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011:81). Multikolinieritas akan membuat variabel independen tidak sama dengan nol. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai toleransi dan varian inflation factor (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011:106). Model yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas salah satunya adalah dengan menggunakan nilai TOL (*tolerance*) dan VIF (*variance inflation factor*).

3.8.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk megetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*) Suliyanto (2011:126). Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian. Adanya autokorelasi akan menyebabkan

penaksiran yang tidak efisien lagi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada-tidaknya masalah autokorelasi salah satunya adalah metode Durbin-Watson (*Durbin Watson Test*) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah nilai dL ($DW < dL$)
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara nilai dU dan $4-dU$ ($dU \leq DW \leq 4-dU$)
3. Terjadi autokorelasi negative, jika nilai DW diatas $4-dL$ ($DW > 4-dL$).

3.8.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain, jika varian dari residual memiliki kesamaan atau tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah ketika varian residualnya bersifat homokedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji gletser. Uji Gletser mengusulkan untuk mengregres nilai absolut residual terhadap variabel independen, dengan ketentuan bahwa probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

3.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas (Suliyanto, 2011:35). Regresi berganda menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/*response* (Y) dengan dua atau lebih variabel

bebas/*predictor* (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya (Yuliara, 2016). Sehingga persamaan matematis regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y = Variabel tak bebas (nilai variabel yang akan diprediksi)

a = Konstanta

b_1, b_2, \dots, b_n = Nilai koefisien regresi

X_1, X_2, \dots, X_n = Variabel bebas

e = Error

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu X_1 dan X_2 , maka bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

a = Konstanta

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = Investasi Swasta

3.8.3 Uji Hipotesis

3.8.3.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memeriksa seberapa jauh perbedaan suatu variabel tidak bergantung pada variabel terikat. Dengan kata lain koefisien

determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang diteliti yaitu pengeluaran pemerintah dan investasi swasta serta pertumbuhan ekonomi.

3.8.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan mencari t hitung pada koefisien dari output SPSS. H_0 akan diterima apabila nilai t hitung $<$ t tabel, itu artinya variabel *dependen* akan tetapi secara nyata. Sedangkan H_a akan diterima apabila t tabel $<$ t hitung, artinya variabel *independen* mampu secara individu dan secara nyata mempengaruhi variabel *dependen*.

3.8.3.3 Uji Simultan (Uji f)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan pengaruh (signifikan) variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel tak bebas. Nilai F statistik dapat dihitung dengan melihat nilai dari F tabel. Nilai F statistik dikatakan signifikan apabila nilainya terletak di dalam daerah kritis, atau hipotesisnya. Dengan kriteria pengujian meliputi H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan batas toleransi kesalahan sebesar 0,05.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomi Kabupaten Luwu terletak antara $2^{\circ}34'45''$ - $3^{\circ}30'30''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}21'15''$ - $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian Timur Laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo disebelah Utara, Teluk Bone disebelah Timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo disebelah Selatan, serta Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang disebelah Barat. Daerah Kabupaten Luwu terbagi menjadi 2 wilayah akibat dari pemekaran Kota Palopo, yakni wilayah Kabupaten Luwu bagian Selatan dan Utara dari Kota Palopo.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih $3.000,25 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan. Sebanyak 9 Kecamatan berbatasan langsung dengan teluk Bone disebelah Timurnya, diantaranya Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan dan Bua. Dari 9 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone terdapat 37 Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 Desa/Kelurahan bukan daerah berpantai.

Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, tercatat sekitar $467,75 \text{ km}^2$ atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-

masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau sekitar. Sedangkan wilayah yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas 34,73 km² atau sekitar 1,16 persen. Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa, jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Bessesangtempe dengan jarak 110 km, Kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan Kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.

Gambar 4.1
Peta Letak Dan Batas Kecamatan Kabupaten Luwu



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Tahun 2021

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu Galena dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat. Besi dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo

Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, Tembaga yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, Besimanganis dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan emas. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab Luwu

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah semakin bergairah kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperluas penyerapan tenaga kerja yang pada hakekatnya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu mengalami peningkatan secara konsisten, pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Luwu mencapai Rp 6,93 triliun dan mengalami peningkatan sebesar Rp 9,16 triliun pada tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan sebesar 555,28 milyar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus

meningkat, yang artinya bahwa perekonomian Kabupaten Luwu terus bergerak kearah yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang lebih baik, selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 8,13% pertahun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 4,7% pertahun dalam kurun waktu yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sector di Kabupaten Luwu, maka terdapat tujuh sector yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi diantaranya, sector jasa kesehatan dan perusahaan (9,91%), sector informasi dan komunikasi (9,34%), sector jasa lainnya (9,10%), sector listrik dan gas (9,02%), sector jasa pendidikan (8,56%), dan sector pertambangan dan penggalian (8,26%).

4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kab. Luwu

Pengeluaran pemerintah daerah diukur melalui belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu yang direalisasikan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Analisis beanja daerah bertujuan untuk memperoleh realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2011-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan umum anggaran serta realisasi penggunaan anggaran maka diperoleh perbandingan belanja daerah yang terbagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti yang disajikan pada tabel dibawah.

| Tahun | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | Total |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2011 | 363.551.05 | 306.197.36 | 669.748.41 |
| 2012 | 395.692.82 | 261.467.48 | 657.160.30 |
| 2013 | 449.107.98 | 338.465.92 | 787.573.90 |
| 2014 | 492.272.86 | 425.085.97 | 917.358.83 |
| 2015 | 602.813.08 | 542.412.95 | 1.145.226,03 |
| 2016 | 778.188.63 | 744.698.04 | 1.522.886.67 |
| 2017 | 729.850.32 | 593.774.92 | 1.323.625.24 |
| 2018 | 788.653.67 | 542.914.94 | 1.331.568.61 |
| 2019 | 819.688.00 | 657.299.99 | 1.476.987.99 |
| 2020 | 789.208.90 | 593.686.80 | 1.382.895.70 |

Selama periode 2011 sampai 2016, belanja tidak langsung tercatat mengalami peningkatan, sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2014, realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp 492,27 Miliar dari anggaran Rp 512,83 Miliar dan mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp 728,18 Miliar dari anggaran Rp 745,82 Miliar, pada tahun 2017 anggaran belanja tidak langsung turun menjadi Rp 729,85 Miliar dengan realisasi sebesar Rp 731,11 Miliar, kemudian meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran Rp 788,65 yang terealisasi sebesar Rp 777,19 miliar.

Sama halnya dengan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan, sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2014 realisasi belanja langsung sebesar Rp 425,09 Miliar dari anggaran Rp 443,41 Miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 806,69 Miliar terealisasi sebesar Rp 744,69 Miliar. Secara proporsi realisasi terhadap anggaran menunjukkan bahwa belanja tidak langsung lebih tinggi dibanding belanja langsung. Belanja daerah memiliki pertumbuhan sebesar

11,19% pertahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja tidak langsung sebesar 12,49% pertahun sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 10,14% sebagaimana ditunjukkan dalam proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja (Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab Luwu Thn 2019-2024, n.d.)

4.2.3 Perkembangan Investasi Swasta Kab. Luwu

Iklim investasi di Luwu menunjukkan perkembangan yang cukup membaik. Posisi Luwu yang strategis menempatkan Luwu menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung.

Tabel 4.1
Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2011-2020

| Tahun | PMA | | PMDN | | Total Investasi |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|-----------------|
| | Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Proyek | Nilai Investasi (Rp) | |
| 2011 | 2 | 62.741,0 | 1 | 0,0 | 62.741 |
| 2012 | 2 | 415.514,9 | 3 | 60.266,0 | 475.780,9 |
| 2013 | 5 | 30.700,5 | 3 | 30.266,1 | 60.966,6 |
| 2014 | 2 | 155.660,2 | 4 | 59.945,2 | 215.605,4 |
| 2015 | 8 | 72.251,4 | 7 | 0,0 | 72.251,4 |
| 2016 | 6 | 33.810,7 | 9 | 520.065,8 | 553.876,5 |
| 2017 | 4 | 29.145,7 | 6 | 408.504,4 | 437.650,1 |
| 2018 | 3 | 4.899,1 | 6 | 32.904,0 | 37.803,1 |
| 2019 | 5 | 2.601,1 | 10 | 59.435,0 | 62.036,1 |
| 2020 | 7 | 23.200,4 | 48 | 23.540,6 | 46.741 |

Sumber: *National Single Window for Investment (NSWI) BKPM*

Realisasi investasi di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi selama periode 2011-2020. Pada tahun 2011 nilai investasi mencapai Rp 62.741 milyar dengan jumlah investor 3 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2020 investasi yang direalisasikan hanya mencapai Rp 46.741 milyar. Mengingat potensi Kabupaten Luwu yang sangat besar untuk investasi di sektor industri berskala besar, maka upaya-upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Kabupaten Luwu perlu dikedepankan. Hal ini disebabkan karena belum terciptanya iklim investasi yang kondusif yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sebaran data berdistribusi normal jika digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebur sampai tidak terhingga. Untuk mendeteksi apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dalam penelitian ini digunakan metode uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Text* dengan ketentuan jika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardize d Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| N | | 10 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .00 |
| | Std. Deviation | 53335.948 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .164 |
| | Positive | .140 |
| | Negative | -.164 |
| Test Statistic | | .164 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* dalam hal ini data berdistribusi normal.

4.3.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 0,10 maka model tersebut tidak mengandung multikolinearitas. Hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 328347.107 | 71689.881 | | 4.580 | .003 | | |
| pengeluaran pemerintah | .004 | .001 | .925 | 7.165 | .000 | .996 | 1.004 |
| investasi swasta | -.018 | .010 | -.239 | -1.849 | .107 | .996 | 1.004 |

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan outpunya nilai tolerance masing-masing variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Investasi Swasta (X2) sebesar $0,996 > 0,10$. Sementara nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah $1,004 < 0,10$ yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.3.1.3 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian. Adanya autokorelasi akan menyebabkan penaksiran yang tidak efisien. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (*Durbin Watson test*) dengan ketentuan jika nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU ($dU < DW < 4-dU$) maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai DW dibawah dL ($DW < dU$) dan jika nilai DW diatas 4-dL maka terjadi autokorelasi. Berikut hasil pengolahan data :

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .940 ^a | .884 | .851 | 60477.280 | 1.764 |

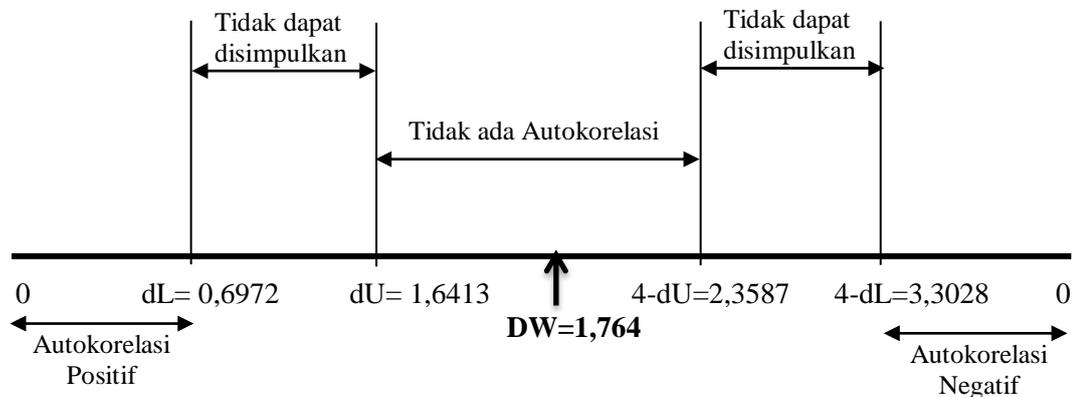
a. Predictors: (Constant), investasi swasta, pengeluaran pemerintah

b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,764. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 10 dan jumlah variabel independent 2, maka pada tabel Durbin-Watson diperoleh $dL = 0,6972$ dan $dU = 1,6413$

Gambar 4.2
Kriteria pengambilan Keputusan Autokorelasi



Berdasarkan keterangan diatas, menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,764 berada diantara nilai dU dan $4-dU$ yang artinya bahwa model regresi terhindar dari gejala autokorelasi.

4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika dalam model regresi terdapat nilai yang sama (konstan/tetap) maka disebut homokedastisitas. Yang diharapkan dalam suatu model regresi adalah adanya homokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada model regresi digunakan uji gletser. Uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independent. Ketentuannya yaitu, apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha ($\text{Sig} > 0,05$) maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. Berikut hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 23 adalah :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 26748.257 | 32034.187 | | .835 | .431 |
| pengeluaran pemerintah | 5.869E-5 | .000 | .075 | .218 | .833 |
| investasi swasta | .005 | .004 | .412 | 1.202 | .268 |

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel pengeluaran pemerintah (X1) adalah $0,833 > 0,05$ dan variabel investasi swasta (X2) adalah $0,268 > 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji gletser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.2 Uji Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, maka penulis telah menganalisis dengan metode regresi linear berganda, dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23, maka hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis regresi Linear Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 328347.107 | 71689.881 | | 4.580 | .003 |
| pengeluaran pemerintah | .004 | .001 | .925 | 7.165 | .000 |
| investasi swasta | -.018 | .010 | -.239 | -1.849 | .107 |

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi
Sumber: Hasil olah Data SPSS 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 diatas maka model untuk menguji Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi selama periode 2011-2020 adalah sebagai berikut:

$$Y = 328347,107 + 0,004 - 0,018 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) diperoleh sebesar 328347,107 artinya adalah variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan nilai konstan atau sama dengan nol (0), maka Pertumbuhan Ekonomi nilainya sebesar 328347,107 (dalam persen).
2. Nilai koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah (X_1) sebesar 0,004 artinya bahwa setiap kenaikan satu persen, maka akan diikuti kenaikan jumlah Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,004 atau 0,04% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Investasi Swasta (X_2) sebesar -0,018 artinya bahwa setiap kenaikan satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,018 atau 1,8% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

4.3.3 Uji Hipotesis

4.3.3.1 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independent menerangkan variabel dependent yang dilihat melalui nilai R Square. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .940 ^a | .884 | .851 | 60477.280 |

a. Predictors: (Constant), investasi swasta, pengeluaran pemerintah

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai R Square (R^2) adalah 0,884 artinya bahwa 88,4% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan variabel investasi swasta (X2). Sedangkan sisanya sebesar 11,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3.1.5 Uji Parsial (t)

Uji digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t_{Hitung} dan t_{tabel} Dengan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan yakni, jika $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ maka H_0 ditolak dan jika $t_{Hitung} < t_{Tabel}$ maka H_1 diterima.

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 328347.107 | 71689.881 | | 4.580 | .003 |
| | pengeluaran pemerintah | .004 | .001 | .925 | 7.165 | .000 |
| | investasi swasta | -.018 | .010 | -.239 | -1.849 | .107 |

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi
Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

1. Uji hipotesis Pengeluaran Pemerintah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

Berdasarkan output tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai t_{Hitung} sebesar 7,165 dan nilai t_{Tabel} sebesar 1,894 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,000 artinya bahwa nilai $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

2. Uji hipotesis Investasi Swasta (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

Berdasarkan output tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai t_{Hitung} sebesar -1,849 dan nilai t_{Tabel} sebesar 1,894 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,107 artinya bahwa nilai $t_{Hitung} < t_{Tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Investasi Swasta secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

4.3.1.6 Uji Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependent dengan taraf signifikan 5% dengan ketentuan jika nilai sig $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent.

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------------|----|---------------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 194734381307.3 37 | 2 | 97367190653. 669 | 26.621 | .001 ^b |
| | Residual | 25602510051.16 3 | 7 | 3657501435.8 80 | | |
| | Total | 220336891358.5 00 | 9 | | | |

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

b. Predictors: (Constant), investasi swasta, pengeluaran pemerintah

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F_{Hitung} sebesar 26,621 dan F_{Tabel} pada tingkat signifikan 5% sebesar 4,74 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ dan nilai sig 0,001 < 0,05 sehingga variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hipotesis 1 : Diduga bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu

Dari hasil pengujian statistik secara parsial yang telah dilakukan antara variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa nilai t_{Hitung} 7,165 > nilai t_{Tabel} 1,894 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,000 < 0,05 serta nilai koefisien regresinya sebesar 0,004 yang artinya setiap kenaikan 1% pengeluaran Pemerintah maka akan diikuti dengan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,004 atau 0,4% sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan lain sebagainya. Realisasi belanja pemerintah daerah pada tahun 2020 mencapai Rp 1.382 milyar secara nominal lebih rendah dari tahun sebelumnya. Total realisasi belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% pertahun, jika melihat persentasenya tingkat pengeluaran pemerintah masih terbilang rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat dampak pandemi menekan belanja pemerintah untuk pegawai dan barang. *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 berdampak pada penurunan penyerapan belanja barang tersebut. Pandemi COVID-19 menyebabkan penerapan *work from home* dan pembatasan perjalanan dinas sehingga biaya operasional kantor dan perjalanan dinas menurun penyerapannya. Sedangkan belanja bansos, hibah, dan bantuan keuangan meningkat seiring tingginya stimulus dampak pandemic COVID-19.

Proyeksi belanja daerah mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah dan analisis kebijakan. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat. Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan

penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Indriatno Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki koefisien jalur sebesar 0,363 berhubungan dan mempengaruhi secara positif, artinya bahwa setiap kenaikan 1% Pengeluaran Pemerintah akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,363%. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pambudy & Syairozi (2019), Siti Aminah (2016), Maharani & Isnowati (2014), Irawati Bawinti (2018) dan Danawati et.al (2016).

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harod-Domar yang menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh apabila pengeluaran pemerintah (G) terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi, sehingga dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatur perekonomian suatu daerah, salah satunya melalui kebijakan fiskal dengan mengalokasikan APBD sesuai dengan porsi dan kebutuhan pemerintah maupun masyarakat yang direalisasikan dalam belanja rutin pemerintah daerah.

2. Hipotesis 2: Diduga bahwa Investasi Swasta berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

Hasil pengujian secara parsial yang telah dilakukan antar variabel investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig sebesar $0,107 < 0,05$ dan koefisien dari variabel investasi swasta adalah -0,18, artinya bahwa investasi swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, jika investasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,18%.

Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dikarenakan pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Dari data realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2020 tercatat 89,98 USD, lebih tinggi dibandingkan nominal pada tahun sebelumnya, namun dari sisi pertumbuhan masih terbilang rendah dari triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan *base effect* PMA masih sangat rendah, peningkatan nominal investasi tersebut disumbang oleh Kabupaten Luwu dan Bantaeng. Sementara itu realisasi PMDN pada Kabupaten Luwu tercatat sebesar Rp 23.54 milyar, realisasi tersebut cukup rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan tingkat investasi dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat dampak pandemi yang menekan kinerja investasi, sejalan dengan realokasi dan *refocusing* anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi. Di sisi lain, pelaku bisnis cenderung *wait and see* ditengah ketidakpastian yang meningkat.

Selain itu penurunan tingkat investasi juga diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, rendahnya infrastruktur pendukung, serta masih kurangnya wirausaha dikalangan generasi muda yang mempengaruhi investasi luar karena investor membutuhkan tenaga yang mempunyai kemampuan berusaha

untuk memberikan keyakinan merealisasikan investasi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Luwu untuk mengoptimalkan peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan potensi dan letak Kabupaten Luwu yang strategis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jirang at.al (2014) yang menyatakan bahwa Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya bahwa peningkatan atau penurunan investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati Bawinti (2018) menyatakan bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena faktor-faktor produksi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan kurangnya sarana produksi, begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Hukubun at.al (2012).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra Ramayani (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena kenaikan investasi akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi dimana investasi akan mengindikasikan kenaikan penanaman modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buana et al (2015), Kurniawan et al (2017), dan Danawati et al (2016).

3. Hipotesis 3: Diduga bahwa Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F_{Hitung} sebesar 26,621 dan F_{Tabel} pada tingkat signifikan 5% sebesar 4,74 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{\text{Hitung}} > F_{\text{Tabel}}$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$ sehingga variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tiap tahunnya, sedangkan untuk investasi swasta belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dikarenakan masih kurangnya pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu untuk menarik minat investor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.
2. Investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta, dengan melihat nilai R Square sebesar 0,884 yang artinya bahwa 88,4% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta sementara 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Dalam penelitian masih terdapat beberapa kendala dalam pengumpulan data, dikarenakan beberapa data tidak tersedia sehingga peneliti hanya memperoleh data dari beberapa platform website yang bentuk penyajiannya masih terbatas. Oleh karena itu diharapkan, penelitian selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih lengkap.
2. Apabila hendak melakukan penelitian terkait pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, agar menggunakan data realisasi pengeluaran pemerintah dan investasi yang mencakup Kabupaten/Kota yang menyeluruh dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun untuk lebih mudah melihat pengaruh yang ditimbulkan.
3. Menambah indikator lain dalam penelitian seperti tingkat konsumsi masyarakat, sektor pariwisata, serta sektor-sektor lain yang dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Adapun saran yang diberikan penulis kepada pemerintah daerah terkait penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, maka dari itu pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan aspek-aspek yang

mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa pengeluaran APBD lebih banyak terserap pada belanja rutin pemerintah melalui pos belanja pegawai, maka diharapkan kepada semua aparatur dapat memberikan hasil yang optimal.

2. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan produktivitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan kualitas SDM.
3. Kabupaten Luwu merupakan wilayah yang strategis, banyak potensi sumber daya yang menjadi ciri khas Kabupaten Luwu, namun hal itu masih terlepas dari pengamatan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu mengambil peran.
4. Investasi swasta perlu ditingkatkan jumlahnya terutama pada sector-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki basis sumber daya yang langsung bersentuhan dengan potensi yang dimiliki oleh alam maupun masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Luwu, yang kemudian mampu menarik investor.
5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigael, L. I., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–10.
- Aminah, S. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 119–130.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. BPS Kabupaten Luwu.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020* (BPS Kabupaten Luwu (ed.)). BPS Kabupaten Luwu.
- Bawinti, I., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Talaud. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 23–33.
- Buana, A. L., Juni, H., Saragih, R., Aritonang, S., & Pertahanan, U. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4, 1–20.
- Danawati, S., Bandesa, I. K. G., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 2123–2160.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–158.
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2017). *Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi Effect of Private Investment and Government Spending and Labor To Local Revenue and the Economic Growth*. 13(2), 68–77.
- Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Periode Februari 2021*. (2021). Bank Indonesia.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekononomi (JBE)*, 21(1), 62–72.

- Mokodompis, R., Rumat, V., & Maramis, M. (2013). Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012). *Jurnal Berkala Efisiensi*, 73–83.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal EKOBIS*, 20(1), 26–39.
- Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab Luwu Thn 2019-2024.* (n.d.).
- Raharjo, A. (2006). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)*. 2003.
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Sitindaon, D. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten demak*. Universitas Negeri Semarang.
- Yuliara, I. M. (2016). *Modul Regresi linier berganda*. Universitas Udayana.